

GUNTINGAN BERITA

| KODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|----------|--------------------------------------|---------|----------|
| MIGAS | NERACA | 1 | 7-8-2002 |

Konsorsium Pengelola Blok CPP Diminta Naikkan Produksi Jadi 50.000 Barel

Jakarta, NERACA

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) meminta konsorsium yang beranggotakan Pertamina dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) meningkatkan produksi minyak di lapangan/blok Coastal Plains Pekanbaru (CPP) dari 43.000 barel/hari menjadi minimal 50.000 barel/hari. Konsorsium itu terhitung mulai lusa (9/8) mengambil alih pengelolaan lapangan CPP dari PT Caltex Pacific Indonesia (CPI).

Kepada wartawan sesuai penandatanganan kontrak *Production Sharing Contract* (PSC) untuk konsorsium tersebut di Jakarta kemarin, Menteri ESDM Purnomo Yudiantoro mengemukakan, peningkatan produksi lapangan CPP akan menambah pemasukan bagi negara. Terlebih jika rencana eksploitasi lapangan minyak laut dalam West Seno sudah bisa mulai direalisasikan tahun 2003.

"Kita sudah memproyeksikan adanya tambahan produksi minyak dari West Seno dan Cepu. Tentu merupakan suatu yang menggembirakan jika Pertamina juga mampu menaikkan produksi lapangan minyak CPP yang dulu dioperasikan Caltex. Kita tahu,

produksi terakhir CPP sekitar 43.000 barel/hari. Padahal di masa kejayaannya, lapangan itu sanggup memproduksi 70.000 barel/hari. Kali ini, paling tidak, kita berharap Pertamina dan anggota konsorsiumnya sanggup menaikkan hingga 50.000 barel/hari," kata Purnomo menjelaskan.

Menanggapi harapan menteri tersebut, Direktur Hulu Pertamina, Iin Arifin Takhyan mengungkapkan, program pertama upaya meningkatkan produksi CPP adalah melakukan perawatan yang lebih intensif pada sumur-sumur yang sudah beroperasi, dan melakukan pemboran sumur-sumur baru. Dari proyeksi sementara, katanya, target produksi 50.000 barel/hari kemungkinan dapat diwujudkan meski harus dengan mengeluarkan investasi yang tidak sedikit.

Perlakuan Sama

Di bagian lain, Menteri Purnomo menegaskan, meski Pertamina dan PT BSP (konsorsium) berstatus sebagai pemegang PSC, pemerintah tetap memperlakukan konsorsium tersebut sama dengan kontraktor PSC lainnya. "Meski sebagai PSC, tidak ada perlakuan istimewa buat konsorsium ini. Se-

mua didasarkan pada prinsip bisnis murni, tidak ada bedanya dengan pemegang PSC lainnya," menteri menegaskan.

Purnomo memuji sinergi yang terjadi antara Pertamina dan PT BSP yang sesungguhnya sebelum konsorsium itu terbentuk banyak pihak yang meragukan usaha patungan antara Pertamina dan Pemda itu bisa terwujud. Boleh jadi, kata Purnomo, keberhasilan ini menjadi model bagi usaha-usaha sejenis lainnya pada masa mendatang.

"Kita ternyata bisa membuktikan bahwa pusat dan daerah bisa menciptakan suatu sinergi dalam membentuk usaha yang menguntungkan. Lebih dari itu, perjanjian Pertamina dan PT BSP dilaksanakan dengan prinsip *business to business*. Ini suatu awal yang baik," kata Purnomo.

Seperti diberitakan *Neraca* sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pelaksana (Balak) Kegiatan Usaha Hulu telah menandatangani kontrak PSC dengan konsorsium Pertamina-PT BSP untuk jangka waktu 20 tahun. Seperti halnya PSC lainnya, porsi bagi hasil migas ditetapkan 85% buat pemerintah dan 15% untuk PSC. (31)